# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perusahaan Indonesia saat ini bersaing dalam hal produk yang diinginkan masyarakat dan pengelolaan keuangan. Laporan keuangan perusahaan yang telah *go public* harus diterbitkan atau dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan yang dipublikasikan dapat dilihat oleh para investor dan publik umum, dan dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola bisnis. Untuk menarik investor penanaman modal, manajemen dan departemen internal perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan dengan benar sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku (Septianingrum et al., 2022).

Perusahaan melakukan tindakan manajemen laba dengan tujuan mencapai laba yang optimal. Manajemen laba dimulai dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan, terutama UU No. 36 Tahun 2008, untuk mengurangi beban pajak. Untuk mendapatkan bonus yang besar, manajer harus berusaha untuk menghasilkan laba yang optimal. Untuk melakukan manajemen laba, manajer harus menyajikan dan melaporkan informasi laba. Tindakan ini dapat merugikan pihak lain karena menerima laporan keuangan yang tidak menunjukkan informasi laba yang sebenarnya, yang dikenal sebagai informasi asimetri. Hal ini terjadi karena ada perbedaan kepentingan antara manajer manajemen langsung perusahaan, terutama manajer dan pemegang saham, dan pihak lain (Deviyarty et al., 2021).

Manajemen sebagai pihak internal perusahaan berupaya meningkatkan laba perusahaan. Tujuan utama yang ingin dicapai manajemen yaitu memperoleh laba setinggi mungkin. Selain itu, laporan keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kinerja manajemennya, melakukan evaluasi peluang pendapatan jangka panjang yang representatif dan evaluasi risiko investasi. Meskipun semua isi laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna, informasi tentang laba seringkali paling penting (Novita et al., 2023).

Manajer cenderung melakukan manajemen laba atau manipulasi laba karena mereka tahu tentang informasi laba. Akibatnya, mereka cenderung terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai, yang disebabkan oleh informasi asimetri dalam teori agensi. Ini karena setiap orang, baik principal sebagai pemegang saham maupun agen sebagai manajer perusahaan, memiliki kepentingan yang berbeda dan ingin memperjuangkan kepentingan masing-masing (Suheri et al., 2020).

Manajemen laba adalah perilaku yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk membuat laba mengalami peningkatan atau penurunan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam hal pelaporan keuangan bagi pihak eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan (Septianingrum et al., 2022). Praktik manajemen laba perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan untuk memilih kebijakan akuntansi dan membuat estimasi akuntansi saat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perpajakan.

Berdasarkan PSAK No. 46 pajak kini adalah adalah total pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak suatu perusahaan selama satu periode. Beban pajak kini adalah jumlah yang ditanggung oleh wajib pajak (Deviyarty et al., 2021). Jumlah pajak kini harus dihitung oleh wajib pajak berdasarkan perkalian penghasilan kena pajak dengan tarif pajak, kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pajak, mereka harus membayar dan menyertakan jumlah tersebut pada Surat Pemberitahuan (SPT) (Tambunan et al., 2022).

Beban pajak kini yang tidak dibayar pada periode berjalan menjadi beban pajak tangguhan yang harus dibayar pada periode mendatang. Berdasarkan PSAK No. 46 mengenai beban pajak tangguhan memberikan wewenang kepada manajemen perusahaan untuk memilih kebijakan akuntansinya sendiri untuk menentukan jumlah pencadangan atas beban atau penghasilan pajak tangguhan atas perbedaan antara PSAK dan peraturan perpajakan. Saat membuat laporan keuangan, perusahaan harus mempertimbangkan beban pajak tangguhan sebagai pengurangan laba, karena semakin tinggi beban pajak tangguhan maka semakin rendah laba perusahaan.

Aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi apabila ada perbedaan waktu yang menghasilkan koreksi positif, yang menghasilkan pajak dan biaya yang rendah sesuai dengan peraturan (Putra & Kurnia, 2019). Aset pajak tangguhan muncul ketika laba akuntansi lebih kecil dari laba kena pajak karena perbedaan sementara. Semakin kecil laba akuntansi dibandingkan dengan laba kena pajak perusahaan dapat menunda pajak terutang untuk periode selanjutnya.

Perencanaan pajak merupakan langkah untuk meminimalkan beban perpajakan (Devitasari, 2022). Pada tahap ini, peraturan pajak dikumpulkan dan diperiksa untuk menentukan metode penghematan mana yang akan digunakan. Manajemen cenderung meminimalkan pembayaran pajak karena keinginan mereka untuk mengurangi dan membuat beban pajak serendah mungkin. Dengan menggunakan perencanaan pajak, perusahaan berharap dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan secara wajar dan legal.

Fenomena yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan nilai *discretionary accrual* dihasilkan dari nilai rata-rata per tahun. Total nilai *discretionary accrual* dibagi dengan jumlah sampel, contoh pada tahun 2018 total nilai *discretionary accrual* sebesar -0,551 dibagi total sampel 29 perusahaan menghasilkan -0,019 dan untuk tahun 2019 sebesar -1,56742, tahun 2020 -1,92359, tahun 2021 -0,09829 terakhir tahun 2022 sebesar -1,02213. Berikut nilai *discretionary accrual* per tahun:

**Gambar 1.1**
**Nilai *Discretionary Accrual* Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022**

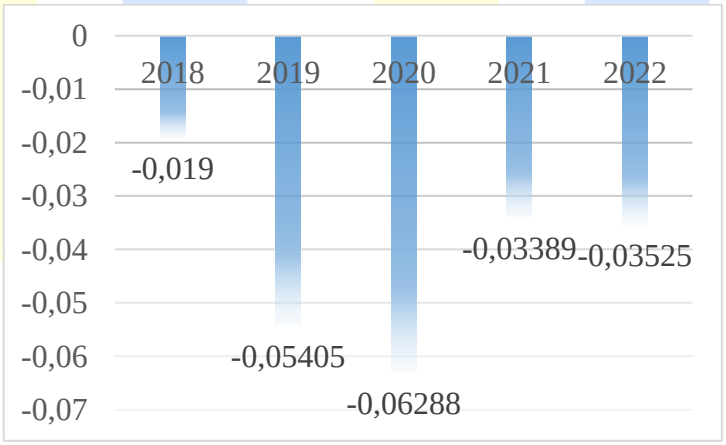


Sumber : Diolah sendiri oleh peneliti (2024)

Berdasarkan gambar 1.1, pada tahun 2018-2022 penerapan tingkat manajemen laba pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* mengalami fluktuasi. Penerapan manajemen laba pada tahun 2018 sebesar -0,019, lalu pada 2019 mengalami perubahan sebesar -0,05405 menandakan bahwa penerapan manajemen laba pada tahun 2019 mengalami perubahan sebesar 0,03505 dibandingkan tahun 2018. Manajemen laba pada tahun 2020 sebesar -0,06288 menandakan bahwa penerapan manajemen laba tahun 2020 juga mengalami perubahan sebesar 0,00883 dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya tahun 2021 tingkat penerapan manajemen laba mengalami perubahan sebesar -0,02899 sehingga penerapan manajemen laba pada tahun 2021 menjadi -0,03389. Penerapan tingkat manajemen laba pada tahun 2022 juga mengalami perubahan sebesar -0,00135 dibandingkan tahun 2021, sehingga tingkat penerapan manajemen laba pada tahun 2022 menjadi -0,03525.

Pandemi COVID-19 memengaruhi banyak industri, terutama pada sektor ekonomi. Pandemi juga menyebabkan banyak perusahaan yang berujung kebangkrutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah tekanan karena pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak kuartal pertama 2020. Menurut Bappenas RI (2020), pemberlakuan PSBB dan WFH menghentikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2,97%. Menurut Bank Indonesia (2020), pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 2,97% (yoy) pada triwulan I 2020 dan terkontraksi 5,32% (yoy) pada triwulan II 2020.

Fenomena praktik manajemen laba pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* terjadi pada perusahaan makanan ringan PT Garudafood Putra Putri Jaya

Tbk (GOOD) mengalami penurunan pada laba bersih menjadi Rp 259,41 miliar pada tahun 2020, nilai tersebut turun dari Rp 416,86 miliar pada tahun 2019. Akhir tahun lalu tercatat lonjakan tahun ke tahun sebesar 60,02 persen. Dalam hal ini, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk gagal mengelola dananya dengan baik, menyebabkan kerugian yang signifikan dan kegagalan menyusun laporan keuangan dengan benar. Untuk mencegah hal ini terjadi, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan manajemen berdasarkan hasil (Cendana & Purwatiningsih, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan telah kehilangan sebagian besar laba mereka dalam waktu yang sangat singkat, salah satunya dengan pada perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) yang bergerak di bidang pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas, dan budidaya perikanan ini mencatat membukukan laba bersih Rp1,76 triliun pada 2019, sehingga laba bersih turun 18,5 persen dibandingkan dengan pencapaian laba pada tahun 2018 sebesar Rp2,16 triliun. Hal ini disebabkan karena beban pokok penjualan dan pemasaran yang membengkak, dimana beban pokok penjualan telah menekan perolehan laba bersih (Wahyuni & Syamsuri, 2022).

Sementara itu, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) membukukan laba bersih sebesar Rp 916,71 miliar pada 2020, turun dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp 916,71 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan penjualan atau penurunan permintaan barang produksi dalam negeri. beban pokok penjualan sebesar Rp 29 triliun atau turun 6,45% dari 2019 sejumlah Rp 31 triliun. Laba kotor menurun 5,71% menjadi Rp 7,42 triliun dari sebelumnya Rp 7,87 triliun. Sementara laba usaha melemah 20,51% menjadi Rp 2,48 triliun dari tahun 2019 sebesar Rp

3,12 triliun. Laba sebelum pajak penghasilan hingga akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp 1,67 triliun, menurun 32,93% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang membukukan Rp 2,49 triliun. Fenomena ini menunjukkan bahwa penurunan laba akan berdampak pada perusahaan, menyebabkan manipulasi laba dilakukan oleh manajemen (Wahyuni & Syamsuri, 2022).

Fenomena yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa kasus pertama, adanya penurunan pada laba bersih yang disebabkan oleh covid-19. Fenomena kedua perusahaan JPFA juga mengalami penurunan laba yang disebabkan oleh penjualan ekspor yang mengalami fluktuatif. Hal ini menyebabkan dampak pada perusahaan yang akan terjadinya kasus manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan manajemen laba adalah kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pihak eksternal, yang memaksa manajemen perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan untuk membuat kinerja perusahaan terlihat baik di mata investor. Selain faktor tersebut, ada beberapa alasan lain mengapa manajemen laba dapat terjadi. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi manajemen laba adalah beban pajak kini. Beban pajak kini adalah jumlah biaya atau beban yang dihitung dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dan harus dibayar oleh wajib pajak (Septianingrum et al., 2022). Wajib pajak harus menentukan sendiri jumlah pajak kini yang harus dibayar, besarnya dihitung dari penghasilan kena pajak yang telah diperhitungkan untuk perbedaan tetap dan waktu, lalu dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya perbedaan dalam perlakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam peraturan perpajakan, wajib pajak mempunyai kebebasan dalam membuat kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan penentuan saat pengakuan pendapatan dan biaya, meskipun kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba, dengan cara menaikkan atau menurunkan laba perusahaan melalui pengakuan pendapatan dan beban.

Penelitian mengenai pengaruh beban pajak kini terhadap manajemen laba telah dilakukan oleh Suheri *et al*.(2020) dan Septianingrum *et al*.(2022). Peneliti Suheri *et al*.(2020) menemukan hasil beban pajak kini berpengaruh positif terhadap manajemen laba artinya semakin besar beban pajak kini maka semakin besar pula kecenderungan manajemen melakukan manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Septianingrum *et al*.(2022) mengatakan bahwa beban pajak kini berpengaruh negatif terhadap manajemen laba artinya semakin rendah nilai beban pajak kini yang dimiliki oleh perusahaan berarti semakin tinggi manajemen laba yang dilakukan. Beban pajak kini merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, maka dari itu manajemen akan berupaya untuk meminimalkan beban pajak kini guna mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.

Faktor kedua yang dapat berdampak pada manajemen laba adalah beban pajak tangguhan. Menurut Septianingrum *et al*.(2022) beban pajak tangguhan merupakan jumlah beban/penghasilan yang muncul akibat adanya pengakuan atas

liabilitas atau aset pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mengidentifikasi manajemen laba perusahaan untuk menghindari kerugian dan penurunan laba. Jika manajemen menunjukkan laba yang besar, pihak *stakeholder* akan mempertimbangkannya untuk melihat laba yang dihasilkan oleh perusahaan, karena jika beban pajak yang dikenakan akan semakin besar jika perusahaan menghasilkan laba. Dengan menggunakan laporan keuangan, *stakeholder* dapat menganggapnya sebagai informasi ketika laba komersial yang diperoleh memiliki perbedaan yang lebih besar dibandingkan dengan laba fiskal. Jika beban pajak tangguhan meningkat, maka semakin meningkat juga usaha manajer untuk melakukan manajemen laba.

Penelitian mengenai pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba telah dilakukan oleh Putra & Kurnia (2019), dan Septianingrum *et al*.(2022). Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Kurnia (2019) beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal Ini menunjukkan bahwa laba perusahaan akan menurun sebagai akibat dari beban pajak tangguhan, yaitu kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Berbeda dengan penelitian Septianingrum *et al*.(2022) yang mengatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba artinya beban pajak tangguhan yang lebih besar menunjukkan tingkat manajemen laba yang lebih baik perusahaan.

Manajemen laba dapat dipengaruhi oleh faktor ketiga, yaitu aset pajak tangguhan. Menurut Suheri *et al*.(2020), aset pajak tangguhan adalah aset yang timbul apabila ada perbedaan waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif

sehingga beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan pajak. Pengakuan aset pajak tangguhan didasarkan pada potensi pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau besar. Jika ada kemungkinan pembayaran pajak lebih kecil pada masa yang akan datang, maka aset tersebut harus diakui sebagai aset berdasarkan standar akuntansi keuangan. Dengan PSAK 46 diberlakukan untuk memberi manajer wewenang untuk mengakui dan menilai kembali aset pajak tangguhan, atau pencadangan nilai aset pajak tangguhan. Manajer dapat memilih kebijakan akuntansi mana yang akan mereka gunakan untuk menilai aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen laba.

Penelitian mengenai aset pajak tangguhan telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Putra & Kurnia (2019), dan Adam & Faridah (2021). Menurut Putra dan Kurnia (2019) aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan dengan adanya aset pajak tangguhan pada perusahaan yang meningkat maka semakin tinggi pula tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Berbeda dengan penelitian Adam & Faridah (2021) aset pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang artinya, jumlah tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan berkorelasi negatif dengan nilai aset pajak tangguhannya. Aset pajak tangguhan sangat erat berkaitan dengan manajemen laba, dengan melakukan rekayasa jumlah aset pajak tangguhan pada laporan keuangan komersial karena itu, berdampak pada laporan keuangan fiskal, yang menunjukkan peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi manajemen laba yakni perencanaan pajak. Menurut Novita *et al*.(2023), perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak, atau kelompok usaha wajib pajak, sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Perencanaan pajak biasanya merujuk pada proses mengubah usaha dan transaksi yang wajib pajak agar beban pajak dapat diminimalkan sambil tetap dalam lingkungan peraturan pajak. Meminimalkan beban pajak dapat memengaruhi angka laba perusahaan yang semakin meningkat. Selain itu, perencanaan pajak juga dilakukan untuk mengurangi kejutan yang disebabkan oleh pemeriksaan pajak yang dilakukan DJP melalui fiskus pada wajib pajak.

Penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba telah dilakukan oleh Suheri *et al*.(2020) dan Devitasari (2022). Menurut Prasetyo *et al*.(2019) perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan diikuti oleh praktik manajemen laba sehingga laba perusahaan mencapai tingkat optimal. Peluang bisnis untuk menjalankan manajemen laba meningkat seiring dengan peningkatan perencanaan pajak. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau dijadikan investasi oleh perusahaan dan diusahakan oleh manajemen untuk meminimalkan agar mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan. Berbeda dengan peneliti Devitasari (2022) yang mengatakan perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

artinya perusahaan akan melakukan manajemen laba untuk mendapatkan pembayaran pajak yang rendah.

Penelitian tentang manajemen laba telah dilakukan oleh banyak peneliti, tetapi hasilnya tidak konsisten. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang subjek ini. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Septianingrum *et al.*(2022) namun ada perbedaan dengan penelitian Septianingrum *et al.*(2022) yaitu, pertama penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak, atau kelompok usaha wajib pajak, sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Alasan peneliti menambah variabel independen perencanaan pajak yaitu untuk mempelajari dan memahami bagaimana faktor tersebut dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. Dalam beberapa penelitian yang sudah dilakukan, kepatuhan dan penyesuaian pajak yang terkait perencanaan pajak dapat memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan, termasuk optimalisasi dan konteks perpajakan. Dengan menambahkan variabel independen ini dapat menganalisis apakah ada hubungan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba.

Perbedaan kedua adalah tahun di mana peneliti dilakukan Septianingrum *et al.*(2022) menggunakan analisis 2016-2019, sedangkan analisis ini digunakan dari 2018-2022. Peneliti mengambil tahun tersebut karena ingin mengetahui perbandingan pada rentan 5 tahun. pada tahun 2018 mengalami penurunan laba yang mengakibatkan perusahaan melakukan manajemen laba. Pada tahun 2022

telah terjadi kenaikan manajemen laba. Perbedaan yang terakhir adalah objek penelitian. Pada penelitian Septianingrum *et al*.(2022) menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian, karena sektor usaha yang terus mengalami kenaikan atau pertumbuhan. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia kebutuhan primer juga akan meningkat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian, yaitu **"Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)".**

## 1.2. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan dibatasi oleh peneliti dengan ruang lingkup penelitian agar pembahasan penelitian bisa lebih jelas dan terperinci sehingga tidak keluar dan melebar dari batasan masalah yang ditetapkan. Berikut merupakan ruang lingkup dalam penelitian ini:

1. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri beban pajak kini, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan dan perencanaan pajak. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah manajemen laba.
2. Penelitian ini dilakukan pada perusahan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Penelitian ini dilakukan selama 5 tahun yaitu 2018-2022.

## 1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil pergerakan tingkat manajemen laba yang telah diolah oleh peneliti menggunakan rumus *discretionary accruals* yang dihitung menggunakan model Jones yang telah dilakukan oleh Adam & Faridah (2021), pada tahun 2018-2022 penerapan tingkat manajemen laba pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* mengalami fluktuasi. Penerapan manajemen laba pada tahun 2018 sebesar -0,019, lalu pada 2019 mengalami perubahan sebesar -0,05405 menandakan bahwa penerapan manajemen laba pada tahun 2019 mengalami perubahan sebesar 0,03505 dibandingkan tahun 2018. Manajemen laba pada tahun 2020 sebesar -0,06288 menandakan bahwa penerapan manajemen laba tahun 2020 juga mengalami perubahan sebesar 0,00883 dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya tahun 2021 tingkat penerapan manajemen laba mengalami perubahan sebesar -0,02899 sehingga penerapan manajemen laba pada tahun 2021 menjadi -0,03389. Penerapan tingkat manajemen laba pada tahun 2022 juga mengalami perubahan sebesar -0,00135 dibandingkan tahun 2021, sehingga tingkat penerapan manajemen laba pada tahun 2022 menjadi -0,03525.

Berdasarkan uraian pada fenomena diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
3. Apakah aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
4. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh beban pajak kini terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

4. Menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

**1.5. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Akademisi

   Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa akuntansi. Selain itu, hasil penelitian ini juga akan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai topik penelitian.

2. Bagi Praktisi

   Hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan pekerjaan sehingga bisa dijalankan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.